

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi sendiri memiliki tiga sifat penting, yaitu suatu proses atau perubahan yang terjadi secara terus menerus, usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita dan kenaikan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa ahli-ahli ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) dengan pengertian pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Mereka mengartikan pembangunan ekonomi sebagai peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) pada suatu tahun tertentu adalah melebihi dari tingkat pertambahan penduduk, atau perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada umumnya masih bercorak tradisional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertambahan penduduk dan apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonominya (Sukirno, 1985:13).

Kemudian menurut Rostow dalam Tambunan (2011) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik,

struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahap, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi.

Ada empat model pembangunan ekonomi, yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Semua itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan produksi atau penjualan barang dan jasa serta menciptakan lapangan kerja baru dengan upah yang layak (Suryana, 2000 dalam Harahap 2014). Adapun sasaran utama dari pembangunan ekonomi pada umumnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta pemantapan stabilitas ekonomi.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Istilah pertumbuhan ekonomi bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lain, maupun negara satu dengan negara lainnya.

Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian pertumbuhan ekonomi, diantaranya Boediono (1994) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan *output* per kapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan yang bersumber dari proses intern perekonomian

tersebut, bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Artinya, pertumbuhan tersebut bersifat *self generating* yang menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi dalam periode selanjutnya. Kemudian menurut Sukirno (1985) pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Salah satu indikasi suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi adalah kehidupan masyarakat yang lebih baik dan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Para ahli ekonomi sudah sejak lama berusaha untuk memahami konsep pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat di suatu negara. Dari pemikiran merekalah lahir teori pertumbuhan ekonomi yang bisa kita pelajari saat ini. Beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith (1723 – 1790), David Ricardo (1772 – 1823), Thomas Robert Malthus (1766 – 1834), dan John Stuart Mill (1806 – 1973). Para ahli ekonomi klasik memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas

tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Dari keempat faktor tersebut, para ekonom klasik menitikberatkan teorinya pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi bersifat tetap.

Adam Smith beranggapan bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertumbuhan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Munculnya spesialisasi tersebut akan meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi. Selain itu Adam Smith dalam buku Boediono, 1985:7, mengatakan bahwa ada dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu, pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk. Dalam pertumbuhan *output* Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Sumber-sumber alam yang tersedia atau faktor produksi tanah
- 2) Sumber daya manusia atau jumlah penduduk
- 3) Stok barang kapital yang ada

Unsur pertama yaitu sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Selama sumber-sumber alam belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih bisa ditingkatkan hingga batas atas dari suatu pertumbuhan ekonomi yaitu apabila sumber-sumber alam sudah dimanfaatkan (di eksploitasi) sepenuhnya. Apabila sumber-sumber alam sudah dimanfaatkan sepenuhnya maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti.

Adapun unsur sumber daya manusia atau jumlah penduduk dalam proses pertumbuhan *output* dianggap mempunyai peranan yang pasif, artinya jumlah

penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Berbeda dengan unsur sumber daya manusia yang berperan pasif dalam menentukan *output*, unsur ketiga yaitu stok kapital secara aktif menentukan *output*. Stok kapital atau akumulasi kapital memiliki peranan yang sentral dalam proses pertumbuhan *output*, apa yang terjadi dengan tingkat *output* tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Begitu pula dengan laju pertumbuhan *output* yang bergantung pada laju pertumbuhan stok kapital.

Bila Adam Smith berpendapat seperti di atas, maka David Ricardo sebaliknya. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar pada suatu saat akan menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing menurun, dimana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Sehingga perekonomian pada tahap ini mengalami stagnasi yang disebut *stationary state*.

Kemudian Thomas Albert Malthus mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur, yang artinya laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan pangan. Akibatnya, bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk (akan terjadi kelaparan). Sehingga masyarakat hidup pada tingkat *subsistence* atau pas-pasan dan perekonomian mengalami stagnasi.

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Berikut ini beberapa tokoh yang mengagas teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yaitu:

- 1) Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), berbeda dengan para ahli ekonomi klasik yang menganggap penduduk sebagai aspek sentral dalam proses pertumbuhan

ekonomi, Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha (*entrepreneurship*), karena mereka berani melakukan inovasi dalam aktivitas produksi. Menurut Schumpeter semakin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi, maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah lama. Pada akhirnya akan tercapai keadaan tidak berkembang atau *stationary state*. Namun, berbeda dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi.

- 2) Sir Henry Roy Forbes Harrod (1900-1978) dan Evsey David Domar (1914-1997) atau lebih dikenal dengan Harrod-Domar. Keduanya memandang bahwa pembentukan modal (investasi) adalah syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap (*steady growth*). Bila pembentukan modal (investasi) telah dilakukan, maka perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah besar.
- 3) Robert M. Solow, menurut Robert Solow dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan *output* yang dihasilkan. Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan *capital stock* dan akan meningkatkan pendapatan sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Akan tetapi dalam kurun waktu tertentu pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan jika telah mencapai apa yang disebut *steady state level of capital*. Kondisi ini terjadi jika investasi sama dengan penyusutan akumulasi modal. Selain tingkat tabungan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi lebih dapat menjelaskan

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Populasi meningkatkan jumlah *labor* dan dengan sendirinya akan mengurangi *capital stock* per pekerja. Tingkat pertumbuhan populasi dan tingkat penyusutan secara bersama-sama akan mengurangi *capital stock*. Menurut Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pertama, meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Ketiga, mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per tenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk melakukan inovasi pada sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi.

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

1. Frederich List (1789 – 1846)

Menurut Frederich List pertumbuhan ekonomi sebuah negara bergantung kepada cara produksi (teknik produksi) dan mata pencaharian masyarakat. Frederich membagi pertumbuhan ekonomi menjadi empat tahap atau disebut dengan *Shuffen Throrien* (teori tangga). Tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Masa berburu dan mengembara, pada tahap ini manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu dan mengembara. Laki-laki bertugas memburu hewan liar sedangkan perempuan bertugas mencari sayur-sayuran dan umbi-umbian. Jika pada suatu lokasi hewan buruan dan tumbuhan telah habis maka

mereka akan berpindah mencari sumber baru atau mengembara ke tempat yang lain. Kondisi tersebut akan terus berulang karena belum ada istilah pertukaran.

- b) Masa beternak dan bertani, di tahap yang kedua ini telah terjadi perkembangan dimana manusia telah menetap di suatu wilayah. Mereka juga memenuhi hidup dengan cara beternak dan bertani. Binatang buruan sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi dipelihara (diterakkan). Begitu pula dengan umbi dan sayuran yang didapat tidak semuanya dikonsumsi, akan tetapi sebagian lainnya di tanam kembali. Karena telah menetap maka pada saat itu mulai muncul perkampungan dan desa-desa.
- c) Masa bertani dan kerajinan, di tahap ini manusia telah mengalami perkembangan dengan mulai melakukan kegiatan yang bersifat kerajinan. Kegiatan tersebut meliputi kerajinan pertukangan dan pandai besi, yang dilakukan sebagai sampingan di sela-sela kegiatan bertani.
- d) Masa kerajinan, industri dan perniagaan, pada masa ini manusia telah mengalami perkembangan dimana telah terdapat sejumlah pabrik yang didirikan, aktivitas industri dan perniagaan. Selain itu muncul kota-kota besar sebagai pusat industri dan perdagangan (perniagaan).

2. Karl Bucher (1847 – 1930)

Menurut Karl Bucher pertumbuhan ekonomi sebuah negara didasarkan pada hubungan antara produsen dan konsumen. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi dibagi kedalam beberapa tahap berikut:

- a) Masa rumah tangga tertutup, di masa ini masyarakat hanya memproduksi barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Bisa dikatakan bahwa kehidupan keluarga atau

rumah tangga saat itu masih sangat sederhana dan bersifat tertutup karena belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok.

- b) Masa rumah tangga kota, kecepatan pertumbuhan penduduk membuat masyarakat tidak lagi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga pada masa ini muncul pertukaran antar desa, masyarakat juga mulai membangun pusat perdagangan dan industri yang disebut dengan kota. Kemudian terjadilah pertukaran yang menimbulkan hubungan antar desa dengan kota.
- c) Masa rumah tangga bangsa (kemasyarakatan), adanya keterbatasan suatu kota dalam memproduksi semua barang mendorong terjadinya pertukaran barang dengan kota lainnya untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Hal itulah yang kemudian menghasilkan pertukaran perdagangan antar kota semakin meluas dalam suatu bangsa dan negara.
- d) Masa rumah tangga dunia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perdagangan atau pertukaran pada masa itu memungkinkan terjadinya pertukaran dengan negara lain, sehingga mendukung pertukaran produk secara internasional.

3. Werner Sombart (1863 – 1947)

Menurut Werner Sombart perekonomian sebuah negara dapat dibagi kedalam tiga tahapan berikut:

- a) Masa perekonomian tertutup, adapun yang menjadi ciri khusus pada masa perekonomian ini yaitu semua kegiatan manusia semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, setiap individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen dan belum ada pertukaran barang dan jasa.

- b) Masa kerajinan dan pertukangan, pada masa ini kebutuhan manusia semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja kemudian menimbulkan pertukaran barang dan jasa, pertukaran barang dan jasa pada masa tersebut belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata saling memenuhi kebutuhan.
- c) Masa kapitalis, di masa ketiga ini muncul kaum pemilik modal (kapitalis). Dalam menjalankan usahanya kaum kapitalis memerlukan para pekerja (kaum buruh). Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekadar memenuhi kebutuhannya, tetapi sudah bertujuan mencari laba atau keuntungan. Masa kapitalis oleh Werner Sombart dibagi menjadi empat masa, sebagai berikut:
- 1) Pra kapitalisme, kehidupan masyarakat pada masa ini masih statis, bersifat kekeluargaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Selain itu mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta hidup secara berkelompok.
 - 2) Kapitalis madya, pada tahap atau masa kedua ini masyarakat sudah lebih dinamis, mereka mulai mengenal uang dan terjadi pertukaran untuk memperoleh keuntungan serta ada pembagian pekerjaan. Kehidupan kekeluargaan pada tahap ini mulai memudar dan berkembang ke kehidupan yang cenderung individualis.
 - 3) Kapitalis raya, pada masa inilah mulai muncul kaum kapitalis (pemilik modal besar). Sehingga kehidupan masyarakat mulai diarahkan untuk

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan modal yang besar maka kaum kapitalis dapat menguasai semua alat produksi dan melakukan produksi besar-besaran. Kemunculan kaum kapitalis tersebut kemudian diikuti oleh kemunculan kaum buruh.

- 4) Kapitalis akhir, kesenjangan hidup antara kaum kapitalis dan kaum buruh mendorong munculnya kaum sosialis yang ingin mewujudkan kemakmuran bersama. Sehingga pada masa ini pemerintah mulai ikut berperan dalam memberi kebijakan. Kemunculan kaum sosialis ini kemudian mendesak dominasi kaum kapitalis.

4. Walt Whitman Rostow (1916 – 1979)

Dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth*, Rostow menguraikan tahapan pertumbuhan ekonomi kedalam lima masa sebagai berikut:

- a) Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*), kehidupan masyarakat pada masa ini masih sangat tradisional. Produksi juga masih bersifat terbatas jumlahnya, karena penggunaan alat produksi yang masih sangat sederhana.
- b) Masyarakat Pra Kondisi untuk Lepas Landas (*The Precondition for Take Off*), masyarakat pada masa ini mulai menyadari bahwa hidup harus mengalami pembaharuan atau perubahan. Mereka mulai terbuka terhadap inovasi dan pemikiran baru serta penggunaan alat produksi yang lebih modern. Hal ini kemudian menyebabkan adanya perubahan sosial, politik serta kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang awalnya bersifat agraris kemudian berubah ke perdagangan dan industri.
- c) Periode Lepas Landas (*Take Off*), pada masa ini hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Hal itu diikuti dengan kemajuan yang pesat pada sektor

industri, sehingga pertumbuhan ekonomi sudah lebih kuat dan siap untuk menuju tahapan selanjutnya.

- d) Menuju Kematangan (*The Drive to Maturity*), pada masa ini manusia telah menggunakan teknologi secara lebih selektif, sehingga pemanfaatan faktor produksi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Sektor industri menjadi sektor yang paling penting dibandingkan dengan sektor pertanian. Selain itu kemampuan negara untuk memproduksi barang juga meningkat sehingga dapat mengurangi tingkat impor.
- e) Tahap Konsumsi Masa Tinggi (*High Mass Consumption*), tahapan ini merupakan yang paling tinggi. Dimana masyarakat sudah mampu mencapai kemakmuran. Lalu, pemikiran masyarakat lebih berfokus pada konsumsi dan pengalokasian penghasilan yang melimpah. Pada masa ini tantangan terberat adalah mempertahankan tingkat kemakmuran itu sendiri.

D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Simon Kuznets (1901-1985)

Pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets adalah kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Lebih lanjut, Kuznets mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor, yaitu peningkatan persediaan barang yang terus-menerus, perkembangan teknologi serta penggunaan teknologi secara efektif dan efisien.

Teori Kuznets dalam analisisnya menambahkan enam ciri atau karakteristik pertumbuhan ekonomi modern, yaitu:

- 1) Tingginya tingkat pendapatan per kapita
- 2) Peningkatan produktivitas yang signifikan

- 3) Laju perubahan struktural tinggi
- 4) Urbanisasi meningkat
- 5) Ekspansi negara maju (kemampuan untuk memperluas pasar meningkat)
- 6) Arus barang, jasa dan modal antarbangsa meningkat.

2.1.2.3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk melakukan pengukuran atau penghitungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Bruto* (GDP). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2019).

Produk Domestik Bruto (PDB) dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu PDB atas dasar harga berlaku (GDP Nominal) dan PDB atas dasar harga konstan (GDP Riil). PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pengukuran atau penghitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat karena pengumpulan data PDB yang cukup sulit dan membutuhkan waktu. Sehingga pada umumnya pengukuran dilakukan dalam setiap tiga bulan (triwulan) dan tahunan. Untuk pengukurannya sendiri dapat menggunakan rumus menurut Sukirno (2005) sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDB}_t - \text{PDB}_{t-1})}{\text{PDB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDB_t : Produk Domestik Bruto tahun t

PDB_{t-1} : Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya

*) tahun t : tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya (berdasarkan harga konstan).

2.1.3 Investasi Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI)

Investasi asing langsung merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Investasi asing langsung dianggap lebih menguntungkan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dibandingkan investasi portofolio, karena masuknya investasi asing langsung ke suatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology* (alih teknologi), *transfer of management skill* (alih keterampilan manajemen), risiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable* serta dapat membuka lapangan kerja baru. Dengan kata lain, adanya investasi asing langsung atau *foreign direct investment* akan menguntungkan bagi negara penerima (*house country*).

Menurut Hady (2001) Investasi asing langsung adalah investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah dan bahan baku disertai dengan campur tangan investor secara langsung dalam

manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Investasi asing langsung tersebut biasanya dimulai dengan pendirian *subsidiary* (anak perusahaan) atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional atau *multinational corporation* (MNC) dengan operasi di bidang manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi pengolahan, ekstraksi sumber alam, industri jasa, dan lain sebagainya.

Selanjutnya Ball *et al.* (2014:19) menyatakan bahwa investasi asing langsung diwujudkan dalam peralatan, struktur dan organisasi di negara asing pada level yang cukup untuk mendapatkan kontrol manajemen secara signifikan, sehingga tidak hanya berinvestasi dalam bentuk saham saja. Sedangkan menurut Griffin dan Michael (2015), para ahli statistik pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah investasi asing langsung adalah suatu kepemilikan atas penguasaan sepuluh persen (10 %) atau lebih dari saham suatu perusahaan yang bentuknya bukan perseroan terbatas.

Menurut Hady (2001) dalam Yuniasih (2011) ada lima faktor utama yang menyebabkan terjadinya aliran modal, keterampilan dan teknologi dari negara pembawa modal (investor) ke negara penerima modal, yaitu:

- 1) Adanya iklim penanaman modal atau iklim investasi di negara-negara penerima modal itu sendiri yang mendukung keamanan berusaha, hal tersebut ditunjukkan oleh stabilitas politik serta tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal.
- 2) Prospek yang baik bagi perkembangan usaha di negara penerima modal.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan.

- 4) Tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah serta potensi pasar dalam negara penerima modal.
- 5) Aliran modal pada umumnya cenderung mengalir kepada negara-negara yang tingkat pendapatan nasional per kapita-nya relatif tinggi.

Kemudian Winantyo (2008) menyatakan motif utama dari investasi asing langsung, sebagai berikut:

1) *Resource Seeking*

Investasi asing langsung dengan motif *Resource Seeking* dilakukan untuk memperoleh faktor produksi yang lebih efisien baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia (tenaga kerja).

2) *Market Seeking*

Investasi asing langsung dengan motif *Market Seeking* dilakukan dalam rangka membuka pasar baru atau menjaga pasar yang sudah ada. Investasi ini dipandang sebagai *defensive strategy* karena lebih didorong oleh kekhawatiran kehilangan pasar daripada upaya mencari pasar baru.

3) *Efficiency Seeking*

Dengan motif ini investasi asing langsung dilakukan karena adanya dorongan untuk meningkatkan keuntungan melalui peningkatan skala ekonomis.

4) *Strategic Asset Seeking*

Investasi asing langsung dengan motif *Strategic Asset Seeking* merupakan investasi taktis untuk mencegah penguasaan atas sumber daya oleh perusahaan pesaing.

2.1.4 Ekspor

Secara sederhana, ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor biasanya dilakukan suatu negara apabila negara tersebut mampu memproduksi barang dalam jumlah besar dan kebutuhan dalam negeri akan barang tersebut sudah terpenuhi. Lebih lanjut Amir (2004:1) menyatakan bahwa ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditas yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing, dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing dan melakukan komunikasi menggunakan bahasa asing.

Selanjutnya menurut Utomo (2000) dan Triyoso (2004) kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain pada suatu tahun atau periode tertentu.

kegiatan ekspor suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Semakin banyak kegiatan ekspor di negara itu maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik dan bertumbuh beriringan dengan kegiatan ekspor tersebut. Selain itu menurut Todaro (2004) ekspor mendorong tumbuhnya industri-industri besar, sehingga negara-negara berkembang dimungkinkan dapat mencapai kemajuan ekonomi yang setara dengan negara-negara maju.

Menurut Mankiw (2006), dalam pelaksanaannya kegiatan ekspor terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Ekspor Langsung

Ekspor langsung merupakan cara menjual suatu produk (barang atau jasa) dengan bantuan perantara atau eksportir yang ada di negara tujuan ekspor. Pada pelaksanaannya penjualan dilakukan melalui distributor atau perwakilan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Adapun kelemahannya biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

2) Ekspor Tidak Langsung

Ekspor tidak langsung adalah cara atau teknik menjual barang melalui perantara atau eksportir dari negara asal kemudian dijual kembali oleh perantara tersebut melalui sebuah perusahaan manajemen ekspor (*export management companies*) dan perusahaan pengeksportir (*export trading companies*). Kelebihan ekspor tidak langsung adalah sumber daya untuk kebutuhan produksi terkonsentrasi atau terfokus dan perusahaan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Namun, ekspor tidak langsung juga memiliki kelemahan seperti kontrol terhadap jalannya distribusi barang atau produk yang lemah serta pengetahuan terhadap sistem operasi di negara tujuan ekspor menjadi terbatas.

2.1.5 Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI)

2.1.5.1 Pengertian Korupsi

Menurut World Bank (2017), korupsi merupakan kegiatan menawarkan, memberi, menerima atau meminta baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar. World Bank menganggap korupsi sebagai suatu hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial, korupsi mengacaukan pembangunan dengan

melakukan distorsi peraturan atau hukum serta melemahkan landasan institusional dimana pertumbuhan ekonomi bergantung. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri maupun orang lain, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Nawatmi (2014), menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan korupsi diantaranya apabila memberi atau menerima hadiah (suap), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dari sekian banyak definisi korupsi yang ada, definisi yang sering digunakan sebagai acuan dalam studi korupsi lintas negara adalah definisi atau pengertian korupsi menurut Transparency International (TI). Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Definisi tersebut meliputi praktik korupsi di sektor publik dan swasta. Sehingga berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara sederhana korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Selanjutnya menurut Amunden dalam Anvig *et al* (2000) terdapat beberapa karakteristik dari korupsi, yaitu:

- 1) Penyuapan (*Bribery*), yaitu pembayaran (dalam bentuk uang atau barang) yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap merupakan jumlah yang tetap, persentase dari sebuah kontrak atau bantuan dalam bentuk uang apapun. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat perjanjian atas

nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan maupun perorangan.

- 2) Penggelapan (*Embezzlement*), adalah pencurian sumber daya oleh pejabat yang diajukan untuk mengelolanya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk korupsi ketika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumber daya publik atas nama masyarakat.
- 3) Penipuan (*Fraud*), merupakan kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulasi atau distorsi informasi oleh pejabat publik. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan memanipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadi.
- 4) Pemerasan (*Extortion*), adalah sumber daya yang diekstraksi dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman. Pemerasan adalah transaksi korupsi dimana uang diekstraksi oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya.
- 5) Favoritisme, adalah kecenderungan diri dari pejabat negara atau politisi yang memiliki akses sumber daya negara dan kekuasaan untuk memutuskan pendistribusian sumber daya tersebut. Favoritisme juga memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Selain itu, favoritisme juga mengembangkan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan secara privatisasi.
- 6) Nepotisme, adalah bentuk khusus dari favoritisme. Salah satu bentuknya adalah mengalokasikan kontrak berdasarkan kekerabatan atau persahabatan.

Chetwynd et al. (2003) menyatakan bahwa korupsi mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan ekonomi berdasarkan beberapa teori berikut:

- 1) Korupsi menghambat investasi asing dan investasi domestik (investasi dalam negeri), meningkatkan biaya sewa dan menciptakan ketidakpastian serta mengurangi insentif bagi investor asing dan domestik.
- 2) Korupsi pajak kewirausahaan, wirausahawan dan inovator memerlukan lisensi dan izin untuk barang-barang mereka, adanya praktik korupsi pajak kewirausahaan memaksa wirausahawan dan inovator membayar suap sehingga mengurangi margin keuntungan.
- 3) Korupsi menurunkan kualitas infrastruktur publik, sumber daya publik digunakan untuk kepentingan pribadi, standar diabaikan, dana untuk operasional dan pemeliharaan dialihkan untuk keuntungan pribadi.
- 4) Korupsi mengurangi pendapatan pajak, perusahaan dan kegiatannya didorong ke sektor informal dengan mengambil sewa berlebihan dan pajak dikurangi sebagai gantinya perusahaan memberikan imbalan kepada pejabat pajak yang korup.
- 5) Korupsi mengalihkan bakat menjadi *rent seeking*, pejabat yang seharusnya dapat terlibat dalam kegiatan produktif menjadi sibuk mengambil keuntungan dari sewa.
- 6) Korupsi mendistorsi keseimbangan komposisi pengeluaran atau belanja publik, pencari keuntungan (*rent seekers*) akan mencari proyek yang paling mudah dan terselubung (tidak jelas) serta mengalihkan dana dari sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

2.1.5.2 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI)

Korupsi terjadi di semua negara, terlepas dari tingkatan sosial dan ekonominya. Pada umumnya, korupsi paling mungkin terjadi ketika sektor swasta dan publik bertemu, khususnya dimana pejabat publik memiliki tanggung jawab

langsung atas ketetapan pelayanan publik atau penerapan regulasi khusus. Besaran tingkat korupsi sendiri sebenarnya merupakan hal yang sulit untuk diukur. Namun, beberapa organisasi dunia menyusun beberapa indeks pengukuran korupsi, sehingga korupsi dapat diukur.

Transparency International (TI) merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang melakukan survey kepada para pengusaha, masyarakat, dan para ahli tentang persepsi korupsi di suatu negara. Persepsi korupsi dari masyarakat, pengusaha, dan para ahli ini selanjutnya disajikan dalam bentuk indeks yang disebut sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI). Indeks Persepsi Korupsi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorf pada tahun 1995 dari Transparency International (TI).

Transparency International menggunakan Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara dalam sektor publik. IPK merupakan indikator agregat yang menggabungkan berbagai sumber informasi tentang korupsi, sehingga memungkinkan untuk membandingkan tingkat korupsi setiap negara. Semua sumber informasi yang digunakan untuk membangun IPK dihasilkan oleh organisasi pengumpul data yang terkemuka. Tiga belas sumber data dari 12 (dua belas) lembaga independen digunakan oleh Transparency International untuk membangun indeks persepsi korupsi, yaitu:

- 1) African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment
- 2) Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators
- 3) Bertelsmann Stiftung Transformation Index
- 4) Economist Intelligence Unit Country Risk Service

- 5) Freedom House Nations in Transit
- 6) Global Insight Country Risk Ratings
- 7) IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook
Executive Opinion Survey
- 8) Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence
- 9) The PRS Group International Country Risk Guide
- 10) World Bank Country Policy and Institutional Assessment
- 11) World Economic Forum Executive Opinion Survey
- 12) World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey
- 13) Varieties of Democracy (V-Dem)

Setiap sumber yang digunakan untuk membangun IPK harus bisa mengukur cakupan keseluruhan tingkat korupsi (frekuensi dan ukuran transaksi) di sektor publik dan politik, dimana sumber tersebut memberikan peringkat pada setiap negara dan peringkat ini merepresentasikan tingkat korupsi yang berbeda di setiap negara. Metodologi yang digunakan untuk menilai indeks persepsi korupsi ini harus sama untuk semua negara yang diambil dari sumber terpilih.

Ketigabelas sumber tersebut menilai perilaku korup dan mekanisme pencegahan korupsi di suatu negara, seperti:

- 1) *Bribery* (Penyuapan)
- 2) *Diversion of public funds* (Penyimpangan dana publik)
- 3) *Use of public office for private gain* (Menggunakan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi)
- 4) *Nepotism in the civil service* (Nepotisme dalam pelayanan publik)
- 5) *State capture* (Penguasaan oleh negara)

- 6) *The government's ability to enforce integrity mechanisms* (Kemampuan Pemerintah untuk menegakkan mekanisme integritas)
- 7) *The effective prosecution of corrupt officials* (Penuntutan yang efektif terhadap pejabat korup)
- 8) *Red tape and excessive bureaucratic burden* (Birokrasi dan regulasi yang berlebihan)
- 9) *The existence of adequate laws on financial disclosure, conflict of interest prevention and access to information* (Keberadaan undang-undang yang memadai tentang pengungkapan keuangan, pencegahan konflik kepentingan dan akses ke informasi)
- 10) *Legal protection for whistleblowers, journalists and investigators* (Perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyelidik)

Indeks persepsi korupsi (IPK) disajikan dalam bentuk nilai dengan rentang antara 0 sampai dengan 100. Semakin rendah IPK yaitu mendekati 0 (nol) maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. Sebaliknya semakin tinggi nilai IPK yaitu mendekati 100 (seratus), maka semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut. Secara lebih rinci skor indeks persepsi korupsi terbagi menjadi empat interval yaitu, 0 – 19 yang berarti sangat korup (high corruption), 20 – 39 cenderung korup, 40 – 59 rentan korup, 60 – 79 cenderung bersih dan 80 – 100 sangat bersih (very clean). Skor tersebut menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi (Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ciamis (2019) dan Transparency International Indonesia, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh investasi asing langsung, ekspor dan indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Metode	Variabel	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN tahun 1990-2009; Mohamad Riyad (2012).	<i>Generalized Least Square (GLS)</i> dengan model estimasi <i>fixed effect</i> .	Y: Pertumbuhan ekonomi X1: <i>Trade openness</i> X2: FDI X3: Investasi domestik X4: Pengeluaran Pemerintah X5: Angkatan Kerja X6: Tingkat inflasi	Hasil analisis menunjukkan bahwa <i>trade openness</i> , FDI, investasi domestik, pengeluaran pemerintah, dan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN. Sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN. Sedangkan total penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN-5.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Determinasi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-6; Aprilia dan Dini Hariyanti (2014).	Regresi data panel dengan pendekatan <i>fixed effect model</i> (FEM).	Y: Pertumbuhan Ekonomi X1: <i>Foreign direct investment</i> X2: <i>Trade openness</i> X3: <i>Gross fixed capital formation</i> X4: Tingkat inflasi	<i>Foreign direct investment, trade openness, gross fixed capital formation</i> dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-6.
3.	Determinasi pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN periode tahun 1996-2013; Desyana Eka Pramasty dan Lydia Rosintan (2015).	Regresi data panel dengan pendekatan <i>fixed effect model</i> (FEM).	Y: Pertumbuhan Ekonomi X1: Utang luar negeri X2: Investasi asing langsung X3: Inflasi	Secara simultan ketiga variabel bebas (X1, X2, X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN periode tahun 1996-2013. Secara parsial utang luar negeri dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tujuh negara ASEAN periode 1996-2013. Sedangkan investasi asing langsung secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tujuh negara ASEAN periode 1996-2013.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Determinasi pertumbuhan ekonomi di ASEAN; Taufiq Rahman dan Jakaria (2015).	Regresi data panel dengan pendekatan <i>fixed effect model</i> (FEM).	Y: Pertumbuhan ekonomi X1: <i>Foreign direct investment</i> X2: <i>Gross fixed capital formation</i> X3: <i>Trade openness</i>	Secara bersama-sama (simultan) <i>foreign direct investment</i> , <i>gross fixed capital formation</i> , dan <i>trade openness</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Adapun secara parsial hanya variabel <i>foreign direct investment</i> saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN
5.	Pengaruh investasi, pendidikan, pertumbuhan penduduk dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi 24 negara Asia periode 2004-2013; Ivon Kristin Nip, Suyanto dan Made Siti Sundari (2016).	Regresi data panel dengan pendekatan <i>fixed effect model</i> (FEM).	Y: Pertumbuhan ekonomi X1: Investasi X2: Pendidikan X3: Pertumbuhan Penduduk X4: Ekspor Primer X5: Ekspor Manufaktur	Secara simultan investasi, pendidikan, pertumbuhan penduduk, ekspor primer dan ekspor manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 24 negara Asia pada periode 2004-2013. Secara parsial investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 24 negara Asia pada

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>periode 2004-2013. Pendidikan dan ekspor primer secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 24 negara Asia pada periode 2004-2013. Sedangkan pertumbuhan penduduk dan ekspor manufaktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 24 negara Asia pada periode 2004-2013.</p>
6.	<p>Pengaruh indeks kemudahan berbisnis, <i>foreign direct investment</i> dan populasi penduduk terhadap perekonomian ASEAN; Daniel Theodoris, Ni Putu Wiwin Setyari dan Luh Putu Aswitari (2017).</p>	<p>Regresi linier berganda dengan pendekatan <i>fixed effect model</i> (FEM)</p>	<p>Y: Produk domestik bruto X1: Indeks kemudahan berbisnis X2: <i>Foreign direct investment</i> X3: Populasi penduduk</p>	<p>Secara simultan ketiga variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB ASEAN. sedangkan secara parsial indeks kemudahan berbisnis, <i>foreign direct investment</i>, dan populasi penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PDB ASEAN.</p>
7.	<p>Peran <i>foreign direct investment</i> (FDI) dan human capital dalam mempengaruhi</p>	<p>Regresi linier berganda dengan pendekatan</p>	<p>Y: Pertumbuhan GDP</p>	<p><i>Foreign direct investment</i> (FDI) dan <i>human capital</i></p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan ASEAN periode 2005-2014; Wahyu Suluh Furqonnanto (2017).</p>	<p><i>fixed effect model</i> (FEM).</p>		<p>berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan ASEAN periode 2005-2014.</p>
8.	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik bruto negara-negara ASEAN periode 2005-2014; Leorista Milliaro (2017).</p>	<p>Regresi data panel dengan pendekatan <i>fixed effect model</i> (FEM).</p>	<p>Y: PDB X1: Angkatan kerja X2: Ekspor barang dan jasa X3: Penerimaan sektor pariwisata internasional X4: Investasi asing langsung</p>	<p>Secara simultan semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB di negara-negara ASEAN periode 2005-2014. Adapun secara parsial penerimaan sektor pariwisata internasional dan investasi asing langsung berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) negara-negara ASEAN periode 2005-2014. Lalu, ekspor barang dan jasa secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) negara-negara ASEAN periode 2005-2014. Sedangkan angkatan kerja tidak berpengaruh</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN periode 2005-2014.
9.	Dampak akumulasi modal, ekspor, <i>marginal efficiency of capital</i> (MEC), inflasi dan sistem pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi; Asti Karlina Dewi (2017).	Regresi linier berganda dengan model <i>ordinary least square</i> (OLS).	Y: Pertumbuhan ekonomi (PDB) X1: Akumulasi Modal X2: Ekspor X3: <i>Marginal efficiency of capital</i> (MEC) X4: Inflasi X5: Sistem pemerintahan	Secara parsial pengaruh akumulasi modal, ekspor dan sistem pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah positif signifikan. Sedangkan pengaruh MEC dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak signifikan.
10.	Pertumbuhan ekonomi dan korupsi di Indonesia: pendekatan <i>good governance</i> ; Badara Shofi Dana, Eni Supriyanti dan Irin Cahyawati (2017).	Analisis <i>ordinary least square</i> (OLS).	Y: GDP X1: Korupsi (CPI) X2: Kinerja pemerintah X3: Pengeluaran pemerintah	Korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap GDP (pertumbuhan ekonomi) Indonesia. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan kinerja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pertumbuhan ekonomi Indonesia.
11.	Pengaruh <i>foreign direct investment</i> , ekspor dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN (studi pada produk domestik bruto Indonesia, Malaysia dan Thailand periode tahun 2007 – 2016); Aya Shopia dan Sri Sulasmiyati (2018).	Regresi linear berganda	Y: Pertumbuhan ekonomi X1: FDI X2: Ekspor X3: Utang luar negeri	Secara simultan FDI, ekspor dan utang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand. Secara parsial FDI, ekspor dan utang luar negeri berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia dan Thailand.
12.	Pengaruh inflasi, investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia; Riris Prantika Putri, Heriberta, dan Emilia (2018).	Regresi linier berganda.	Y: Pertumbuhan Ekonomi X1: Inflasi X2: <i>Foreign direct investment</i> X3: Pengeluaran pemerintah	Secara parsial Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan <i>foreign direct investment</i> (FDI) dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun secara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				simultan inflasi, FDI dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
13.	Investasi asing langsung dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN periode 2004-2016; Aditya Febriananta Putra, Suyanto dan Irzameingindra Putra Radjiman (2019)	Regresi data panel dengan pendekatan <i>fixed effect model</i> (FEM).	Y: Pertumbuhan Ekonomi X1: <i>Fixed capital formation</i> X2: <i>Labor</i> X3: <i>Foreign Direct Investment</i> X4: <i>Export</i> X5: <i>Agriculture</i> X6: <i>Manufacture</i> X7: <i>Service</i> X8: <i>Fertility</i>	Variabel <i>labor</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN, <i>Service</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN. Sedangkan <i>fixed capital formation, foreign direct investment, export, agriculture, manufacture, dan fertility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN.
14.	Pengaruh korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5; Lutfiana	Regresi data panel dengan pendekatan <i>fixed effect model</i> (FEM).	X1: Indeks persepsi korupsi X2: Pengeluaran pemerintah X3: Konsumsi	Indeks persepsi korupsi, pengeluaran pemerintah dan konsumsi berpengaruh positif signifikan terhadap

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Fiqry Ichvani dan Hadi Sasana (2019).		X4: Keterbukaan perdagangan	pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5. Sedangkan keterbukaan pasar berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu hubungan investasi asing langsung, ekspor dan indeks persepsi korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hubungan Investasi Asing Langsung dengan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, diantaranya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan pembentukan modal, serta sebagai sarana transfer teknologi dan pengetahuan di bidang manajemen dan pemasaran. Selain itu investasi asing langsung tidak mengakibatkan kewajiban pembayaran utang maupun bunga (Hady, 2001).

Selaras dengan pendapat di atas, Wahyu (2017) mengemukakan bahwa investasi asing langsung berpengaruh secara signifikan dan memiliki tanda koefisien yang positif, yaitu sebesar 0,53335220. Artinya, pada saat investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN tahun 2005-2014 akan meningkat sebesar 0,53%. Kemudian, Penelitian Theoderis, dkk. (2017) juga menyatakan investasi asing langsung

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sembilan negara ASEAN tahun 2010-2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara investasi asing langsung dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif, yaitu ketika investasi asing langsung (*foreign direct investment*) mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya apabila investasi asing langsung menurun maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan.

2) Hubungan Ekspor dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dewi (2017) melakukan penelitian mengenai dampak akumulasi modal, ekspor, *marginal efficiency of capital* (MEC), inflasi dan sistem pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1987 hingga tahun 2016 dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan model *ordinary least square* (OLS). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut selaras dengan penelitian Aya Shopia dan Sri Sulasmiyati (2018) yang menyatakan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kedua hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa ekspor dapat memperluas pasar dan memungkinkan negara pengekspor memperoleh dana untuk mengimpor barang lain termasuk barang modal yang akan mengembangkan perekonomian lebih lanjut. Selanjutnya perkembangan ekspor yang pesat akan menyebabkan pertambahan dalam pembelanjaan agregat yang pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif. Dimana ketika ekspor mengalami kenaikan atau peningkatan maka akan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya apabila ekspor menurun maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan.

3) Hubungan Indeks Persepsi Korupsi dengan Pertumbuhan Ekonomi

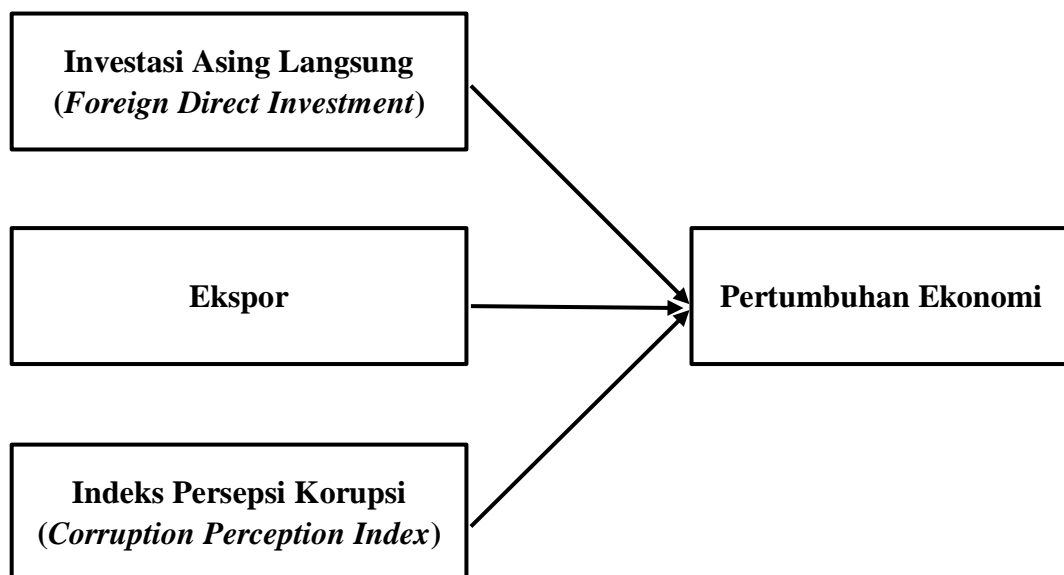
Beberapa ahli berupaya mengidentifikasi hubungan antara korupsi dengan perekonomian. Menurut Aidt (2009) dalam penelitian pengaruh korupsi terhadap perekonomian terdapat dua pihak yang saling berseberangan yaitu pihak yang mendukung *grease the wheel hypothesis* (GWH) dan pihak yang mendukung *sand the wheel hypothesis* (SWH). *Grease the wheel hypothesis* (GWH) menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas (oli) bagi perekonomian, dengan kata lain korupsi berdampak positif terhadap perekonomian. Pendapat GWH dianalogikan dalam upaya mendapatkan suatu izin pendirian perusahaan. Leff (1964) dan Lui (1985) mengungkapkan bahwa pada kondisi sistem kelembagaan yang tidak baik, pengurusan dan pemberian izin pendirian perusahaan akan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Untuk mengurangi waktu menunggu dalam mendapatkan izin perusahaan, maka individu memberikan suap kepada pegawai publik agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pemberian izin tersebut. Analogi tersebut kemudian memunculkan pendapat bahwa korupsi dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian. Pernyataan Leff (1964) dan Lui (1985), selaras dengan hasil penelitian Nilson (2017) yang menyatakan bahwa korupsi dalam jangka pendek berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Eropa Selatan. Lalu Ondo (2017) juga menyatakan bahwa korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sand the wheel hypothesis (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Pendukung SWH antara lain, Rose Ackerman (1978), Shleifer dan Vishny (1993), Jain (2001), Mo (2001), Mauro (1995; 1998), Meon dan Sekkat (2005), Henderson dan Kuncoro (2006) serta Rivayani (2008), kemudian Paul (2010), Hariyani (2016), Nawatmi (2016), Agostino *et al.* (2016), serta Hakimi dan Hamdi (2017). Para ekonom sendiri lebih sepakat terhadap SWH yaitu korupsi berpengaruh buruk bagi perekonomian. Alasannya, *grease the wheel hypothesis* (GWH) hanya menganalogikan efek positif korupsi terhadap perekonomian ketika sistem kelembagaan tidak baik yaitu sistem birokrasi yang lama dan berbelit-belit. Namun, dalam sistem kelembagaan yang baik GWH tetap berpendapat bahwa pengaruh korupsi terhadap perekonomian adalah negatif.

Tingkat korupsi di suatu negara dapat diukur dari tingkat persepsi korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh Transparency International (TI). Lembaga tersebut mengukur indeks persepsi korupsi (IPK) atau *corruption perception index* (CPI) dari angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus), dimana semakin mendekati 100 maka korupsi di suatu negara semakin kecil dan sebaliknya semakin mendekati 0 maka korupsi semakin tinggi. Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap perekonomian yang di proksi sebagai pertumbuhan ekonomi. Seperti Mauro (1995) yang menemukan bukti bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian Haryanto (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh indeks persepsi korupsi (IPK) terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tahun 2002-2011, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa IPK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti semakin kecil tingkat korupsi maka

pertumbuhan ekonomi semakin besar (meningkat). Penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian Lutfiana Fiqry Ichvani dan Hadi Sasana (2019) yang menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tahun 1997-2016.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu ketika korupsi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun dan begitupun sebaliknya. Kemudian dapat diartikan juga bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana, ketika nilai IPK mengalami kenaikan (mendekati seratus) maka tingkat pertumbuhan akan ikut mengalami kenaikan dan sebaliknya apabila nilai IPK menurun (mendekati nol) maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka model kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Diduga Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), Ekspor dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara-negara ASEAN.
- 2) Diduga Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), Ekspor dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara-negara ASEAN.